

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar dan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan. Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 18 Tahun 2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 3 Tahun 2014 atas perubahan keduanya tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan perikanan tahun 2010 - 2014, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif.

Dalam mencapai tujuan menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mencapai misi Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu "Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015", maka Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berusaha merealisasikan kebijakan tersebut melalui program Minapolitan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan diperlukan perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim. Sehingga diperlukan sistem

pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Pembangunan perlu dilakukan dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif.

Minapolitan diperkenalkan pertama kali oleh Fadel Muhammad pada tahun 2010. Dimana program pengembangan kawasan minapolitan perikanan terdiri dari tiga bidang yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran serta terdiri dari tiga basis yaitu penangkapan, budidaya dan sentra garam. Dikarenakan keterbatasan lingkup minapolitan yang ada di lokasi penelitian, maka pada penelitian ini akan dibahas tingkat keberhasilan implementasi dari program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap, sesuai dengan lingkup dan bidang minapolitan yang ada di pelabuhan Muncar. Pada tahun 2010 telah ditetapkan 9 wilayah pengembangan Minapolitan (kota sentra pengolahan ikan) percontohan berbasis perikanan tangkap dengan salah satu lokasi pengembangan kawasan Minapolitan tersebut adalah Pelabuhan Muncar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2013 atas perubahan ketiganya tentang penetapan kawasan Minapolitan, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan sebagai kawasan ke 95 dari 179 lokasi dan Kecamatan Muncar telah ditetapkan sebagai kawasan ke 78 dari 145 lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pembangunan Minapolitan telah dimulai pada tahun 2010 di Muncar dengan program pengembangan wilayah berbasis perikanan tangkap. Dimana beberapa program yang ada di UPT-PP Muncar yaitu Pembangunan Revenmen dan Reklame Tanah Dermaga deck on pile Breakwater, Pembangunan Los Pasar Ikan Basah, Pembangunan Plengsengan/Talud, Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan (jalan), Pembangunan dan peningkatan

pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh, bantuan alat-alat perikanan, pembinaan, penyuluhan dan lainnya.

Program minapolitan telah berjalan 5 tahun sejak diperkenalkannya program ini di Muncar. Sejak dilaksanakannya kegiatan pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Muncar menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas konsep Minapolitan disambut dingin warga disebabkan pendekatan yang dilakukan hanya dengan pendekatan proyek semata. Tetapi setelahnya diupayakan perubahan pendekatan dari fisik ini menjadi sosial. Selain permasalahan tersebut, timbul beberapa permasalahan selama berjalannya program salah satunya kurangnya kerjasama masyarakat nelayan, kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat sehingga sering timbul miss komunikasi serta masalah lainnya yang telah menjadi penghambat dalam menjalankan program pengembangan kawasan minapolitan ini. Melihat hal tersebut maka penting dan perlu adanya evaluasi program Minapolitan untuk mengetahui tingkat keberhasilan, perubahan yang dirasakan serta penghambat lain dan pendukung program tersebut yang akan dibahas dalam hasil penelitian Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Ditinjau dari Tingkat Kesesuaian Program di UPT-PP Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada Tingkat Keberhasilan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Ditinjau dari Tingkat Kesesuaian Program Di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah keberhasilan program Pengembangan Kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan penerima kebijakan untuk masyarakat pesisir?
2. Seberapa besarkah tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan perikanan tangkap di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang Tingkat Keberhasilan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Ditinjau dari Tingkat Kesesuaian Program Di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta/penerima kegiatan.
2. Mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan.
3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Tingkat Keberhasilan Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Ditinjau dari

Tingkat Kesesuaian Program Di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar bermanfaat bagi berbagai pihak yang diantaranya :

1. Kegunaan bagi akademisi dan peneliti adalah dapat menambah wawasan tentang program pengembangan perikanan berbasis Minapolitan serta untuk menunjang peneliti selanjutnya khususnya di bidang program Minapolitan.
2. Bagi pihak pemerintah atau instansi terkait, dapat digunakan sebagai referensi baru dalam pengambilan kebijakan.
3. Bagi pihak umum yang berkepentingan, dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai program Minapolitan, sehingga diharapkan memberikan masukan mengenai program Minapolitan ini sehingga dapat memahami, menerima dan menyikapi program tersebut.

1.5. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian Skripsi dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan(UPT PP) Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang dimulai pada Mei – Juni 2015, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi

No	Kegiatan	Waktu															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembuatan Proposal	■	■														
2.	Konsultasi Proposal			■	■												
4.	Partisipasi aktif dan pengambilan data					■	■	■	■								
5.	Penyusunan Laporan									■	■	■	■	■	■		

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profil Program Minapolitan Perikanan Tangkap

2.1.1. Definisi Minapolitan

Minapolitan merupakan sebuah konsep pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan. Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi kedua hal tersebut. Sedangkan kawasan Minapolitan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Secara umum definisi Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan, Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Dengan adanya konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas dan berakselerasi tinggi.

1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders, baik instansi, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana

- produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan system manajemen yang baik.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.
 3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia.
 4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.

2.1.2. Tujuan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan, dijelaskan bahwasanya Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.1.3. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, maka kawasan Minapolitan adalah suatu

bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan Minapolitan akan dijadikan kawasan ekonomi unggulan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karakteristik kawasan Minapolitan meliputi :

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia didalam kawasan dan daerah sekitarnya.
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian didaerah sekitarnya

2.2. Perencanaan Minapolitan

Untuk mengetahui perencanaan dari program Minapolitan maka dapat dilihat dari konsep dan strategi Minapolitan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan.

a. Konsep Minapolitan

Konsep Minapolitan didasarkan pada prinsip-prinsip Integritas, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi dengan tujuan meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu, Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

b. Strategi Minapolitan

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep Minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan Minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan tujuan dan target-target keberhasilan dapat dilaksanakan dengan percepatan tinggi dengan langkah-langkah strategis seperti:

1. Kampanye Nasional yang dapat dilakukan melalui Media massa, Komunikasi antar lembaga, dan Pameran
2. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil, di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran
3. Mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan Minapolitan
4. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.

5. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Sasaran peningkatan produksi dengan konsep Minapolitan berbasis perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan perikanan dan TPI menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan; dan
- b. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan.

Dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- Menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan;
- Meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya;
- Revitalisasi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, cold storage, dan pabrik es;
- Revitalisasi prasarana, seperti jalan, air bersih dan listrik;
- Bantuan teknis dan permodalan, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan dan TPI;
- Mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih, dan sehat;
- Menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat;
- Restrukturisasi armada, wilayah penangkapan ikan, dan perijinan;
- Pengkayaan stok ikan (stock enhancement) sebagai penyangga produksi;

- Pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak (seperti set net);
- Mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu.

2.3. Pengembangan Kawasan Minapolitan

2.3.1. Tata Laksana Pengembangan Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan Kawasan Minapolitan dapat berbasis Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan, ataupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik bidang yang bersangkutan. Tetapi, secara umum tata laksana pengembangan kawasan Minapolitan mengikuti tahapan berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan berdasarkan persyaratan Kawasan Minapolitan dengan prosedur sebagai berikut:

- Identifikasi keberadaan sentra produksi yang produktif dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui studi kelayakan;
- Penetapan Kawasan Minapolitan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan yang didalamnya mencakup Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak;
- Pengajuan Rencana Induk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum, tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri;

- Proses perencanaan melibatkan para pihak yang terkait, yaitu unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Rencana induk sendiri merupakan rencana pengembangan kawasan Minapolitan di daerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan. Sedangkan rencana perusahaan yaitu rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan Minapolitan dan rencana tindak merupakan rencana implementasi pengembangan kawasan Minapolitan di daerah kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan setelah ada kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan daerah yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan fase lanjutan dari proses pembinaan dan pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan yang sedang berjalan;
- Pelaksanaan pengembangan kawasan Minapolitan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan paket-paket kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk dan kesepakatan antara para pihak terkait pada fase perencanaan;

- Perubahan Rencana Induk pada fase pelaksanaan dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersepakat sesuai perencanaan;
 - Penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana produksi, anggaran yang dapat bersumber dari APBD, APBN, dan DAK sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait; dan
 - Penyiapan paket-paket pendampingan dan bantuan teknis, seperti paket pelatihan, penyuluhan, dan teknologi oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
- c. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta keberhasilan kegiatan dengan indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil; dan
 - Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh bupati/walikota
- d. Pelaporan
- Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur untuk selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, menteri/pimpinan LPNK dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - Hasil analisis laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2.3.2. Persyaratan Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan, suatu

wilayah atau kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan yaitu apabila memenuhi persyaratan kawasan Minapolitan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;
3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan;
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait;
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan;
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan Minapolitan;
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

2.3.3. Kelembagaan Miapolitan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang pedoman umum Minapolitan, untuk melaksanakan pengembangan kawasan Minapolitan diperlukan kelembagaan kuat di kabupaten/kota yang mampu mengintegrasikan kegiatan sektoral di daerah dengan kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh daerah. Kelembagaan Minapolitan di kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/walikota dengan ruang lingkup kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Secara umum kelembagaan Minapolitan di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Sekretaris : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Bidang Perencanaan : Kepala Bappeda
5. Bidang Pemberdayaan/Pelaksanaan : Kepala Pelabuhan Perikanan (perikanan tangkap) atau pihak lain yang mempunyai kompetensi (budidaya atau pengolahan).
6. Bidang Monitoring dan Evaluasi : pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang monitoring dan evaluasi atau pejabat lain yang ditunjuk
7. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

2.4. Konsep Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan dari hal yang telah disepakati. Sehingga dapat diartikan pula bahwa implementasi merupakan penerapan dari program-program atau kebijakan yang telah dibuat yang memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat program atau pembuat kebijakan.

Menurut Sugiana (2012), Implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang terdapat dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga Negara lain dalam rangka mencapai tujuan yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Lebih jauh Sugiana menjelaskan bahwa untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil ataukah tidak harus dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak dan apabila tujuan tidak tercapai maka dianggap suatu kebijakan tersebut tidak tercapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai. Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan akan ada hasil segera dan dampak akhir. Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Hasil segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk menilai implementasi dari suatu kebijakan.

2.5. Minapolitan di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi

Pembangunan Minapolitan di Muncar telah dimulai pada tahun 2010, tetapi menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas konsep Minapolitan disambut dingin warga disebabkan pendekatan yang dilakukan hanya dengan pendekatan proyek semata. Hal tersebut disampaikannya pada rapat Koordinasi Evaluasi Keterpaduan Pelaksanaan dan Pengembangan Minapolitan pada tahun 2011. Pengembangan Minapolitan sebelum tahun 2011 berkisar pada pembangunan fisik atau pendekatan proyek seperti diantaranya pembangunan pemecah ombak atau pasar ikan. Hal itu membuat warga di sekitar Muncar kurang peduli, bahkan tidak tahu-menahu. Setelahnya pada tahun 2011 Bupati Banyuwangi mengupayakan perubahan pendekatan dari fisik menjadi sosial.

Salah satu langkah yang tengah dilakukan di antaranya dengan memberdayakan istri nelayan, melatih sumber daya manusia, dan memanfaatkan potensi lokal sehingga warga disekitar muncar juga akan terlibat langsung dalam pengembangan Minapolitan (Badan Pelatihan Daerah Jawa Timur, 2011).

Muncar pada awal penetapannya sebagai kawasan Minapolitan, telah ditetapkan sebagai lokasi pengembangan kawasan Minapolitan berbasis Perikanan tangkap. Pembangunan khususnya di Muncar berbasis perikanan tangkap dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan baik pembangunan infrastruktur maupun kegiatan perikanan dapat dilihat pada Realisasi Kegiatan dan Alokasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT PP) Muncar serta Penetapan Penerima dan Alokasi Hibah Barang Atas Kegiatan Bidang Perikanan Tangkap di Muncar berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk pembangunan infrastruktur di Muncar yaitu pembangunan revenmen dan reklame tanah dermaga deck on pile breakwater, pembangunan los pasar ikan basah sumberdaya alam, pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan (jalan), pembangunan plengsengan/talud, pembangunan dan peningkatan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh, dan pengerukan kolam labuh. Untuk kegiatan perikanan tangkap yang telah dilakukan di Muncar yaitu pengadaan rumpon laut dangkal, bantuan mesin perahu, bantuan coolbox, bantuan genset, bantuan perahu motor (jukung), bantuan alat tangkap dan jaring nelayan (jaring gillnet, jaring senar atau setet), pembuatan terumbu karang buatan, reklamasi pantai, restocking SDI, pembinaan KUD sekitar lokasi minapolitan, penyuluhan bidang perikanan.

Setelah dilaksanakannya kegiatan ini selama 5 tahun sejak ditetapkannya pada tahun 2010 lalu muncul berbagai faktor pendukung dan

penghambat dari program tersebut. Faktor pendukung yaitu lokasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar yang merupakan pelabuhan dengan kegiatan operasional yang tinggi, permintaan akan ikan segar maupun olahan yang sangat tinggi, serta kondisi pelabuhan yang sangat luas dengan fasilitas yang dimiliki cukup memadai sehingga kegiatan pengembangan kawasan minapolitan di pelabuhan Muncar berupa upaya lanjutan, pelestarian dan pengembangan dari upaya yang sudah ada sebelumnya.

Faktor penghambat dari program pengembangan kawasan minapolitan ini adalah sumberdaya perikanan di Laut Jawa yang mengalami penurunan karena adanya kegiatan over fishing. Sehingga produksi penangkapan mengalami penurunan, sulitnya koordinasi di tiap instansi, rendahnya sebagian kualitas SDM, kurangnya kerjasama masyarakat dan kurangnya pemahaman akan konsep minapolitan, tata tertib yang sering diabaikan serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat sehingga sering timbul miss komunikasi dan kurangnya pemahaman dalam pembangunan. Beberapa hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan usaha pengembangan kawasan minapolitan.

2.6. Evaluasi Program Minapolitan

Program pengembangan kawasan minapolitan pada tahap implementasinya, di beberapa lokasi pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia memberikan hasil berbeda dilihat berdasarkan keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan seperti penelitian Yulidhin Khoirul Aswanah dengan penelitiannya Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa

Timur yang dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2012, dimana hasil penelitian dalam tahap implementasinya pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaannya dan dalam kesimpulannya pelaksanaan program Minapolitan berada pada hasil kurang memuaskan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sukarman Kamuli dalam penelitian Evaluasi tentang Implementasi Kebijakan Pengembanagn Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu dimana dalam penelitian ini hasil implementasi menunjukkan adanya dampak pada perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota nelayan minapolitan. Perubahan tersebut secara nyata dapat dilihat pada kemampuan mengelola usaha penangkapan ikan dan mengembangkan aneka jenis budidaya serta adanya perubahan fisik disekitar lokasi minapolitan dan dalam kesimpulannya pelaksanaan program Minapolitan berada pada hasil cukup memuaskan.

2.7. Importance Performance Analysis (IPA)

Menurut Yola dan Duwi (2013), *Importance Performance Analysis (IPA)* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977. Mereka juga mengungkapkan bahwa *Importance Performance Analysis (IPA)* merupakan alat bantu dalam menganalisis atau digunakan untuk membandingkan sejauh mana antara kinerja dan pelayanan yang dapat dirasakan pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan antara skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan, sehingga tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan skala prioritas yang akan dipakai dalam penanganan.

Dalam jurnalnya yang dikutip dari Tjiptono (2011), Ong dan Jati (2014) mengungkapkan *Importance Performance Analysis (IPA)* merupakan teknik dimana responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan dan kinerja, kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada *Importance Performance Matrix*, yang mana sumbu x mewakili persepsi dan sumbu y mewakili harapan. Maka akan didapat hasil berupa empat kuadran seperti gambar berikut:



Gambar 1. Diagram Kartesius atau Diagram IPA

Kuadran-kuadran tersebut memiliki Interpretasi yang dapat dilihat sebagai berikut:

A : Prioritas Utama (*Concentrate Here*)

Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan atau diharapkan akan tetapi kinerja dinilai belum memuaskan



sehingga pemerintah perlu berkonsentrasi guna meningkatkan performa atau kinerja disektor tersebut.

B : Pertahankan Prestasi (*Keep Up The Good Work*)

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan sehingga wajib untuk mempertahankan prestasi kinerja tersebut.

C : Prioritas Rendah (*Low Priority*)

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan sehingga pemerintah tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut.

D : Berlebihan (*Possibly Overkill*)

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan sehingga pemerintah lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada faktor tersebut kepada factor lain yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi yang telah dilakukan berada di kawasan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan(UPT PP) Muncar yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini dipilih karena kawasan Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013.

3.2. Metode Penelitian

Metode dalam Penelitian Skripsi merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan suatu pengetahuan dan mampu menjawab hal yang sedang dipertanyakan. Penelitian yang telah dilakukan ini dirancang sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif.

Menurut Panjaitan (2006), metode deskriptif adalah teknik yang digunakan seorang peneliti untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan nyata. Tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tetapi mencari teori dan bukan menguji teori, yaitu membangun sebuah hipotesa (*hypothesis-generating*), bukan menguji hipotesa (*hypothesis-testing*). Selain itu Menurut beberapa ahli yang dikutip dalam Umar (1998), menjelaskan bahwa metode deskriptif bertujuan menggambarkan hal yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan mencari sebab dari hal tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi yang telah dilakukan ini merupakan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa

nyata yang telah terjadi tanpa memanipulasi unsur-unsur yang ada dan tanpa adanya suatu uji dari teori yang di dapat tetapi membangun sebuah hipotesa. Hal ini dapat memberikan informasi yang memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

3.3. Teknik Pengambilan Data Penelitian

3.3.1. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya pada saat melakukan penelitian. Di dalam penelitian sosial secara garis besar metode atau teknik pengumpulan data yang biasa digunakan untuk mencari data primer antara lain metode kuisisioner atau angket, metode wawancara dan metode observasi(Waluya, 2007).

Data primer dapat diartikan sebagai data yang didapat secara langsung. Adapun data primer yang dikumpulkan antara lain:

- Kegiatan minapolitan yang telah berjalan,
- Tingkat kepentingan dan kepuasan masyarakat sekitar pelabuhan dengan kegiatan minapolitan serta penghambat dan pendukung program yang didapat dari hasil tanya jawab dan kuisisioner,
- Keadaan perikanan,
- dll

Sedangkan sumber data primer ini diperoleh dari :

- Masyarakat sekitar pelabuhan perikanan
- Instansi ditempat penelitian skripsi

Dalam penelitian skripsi ini teknik pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dilokasi pengamatan. Menurut Djaali dan Pudji Muljono (2008), secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

Observasi yang dilakukan pada saat penelitian skripsi dilakukan dengan mendatangi langsung beberapa lokasi kegiatan minapolitan (bangunan dan lainnya), serta mencatat informasi yang dilihat secara langsung baik informasi tertulis maupun tidak tertulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan dengan tujuan meminta atau untuk mendapatkan informasi dari pihak yang bersangkutan. Menurut Tim Matrik Media Literata (2007), wawancara (*interview*) adalah tanya jawab dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Tanya jawab dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yakni orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan orang yang di wawancara (narasumber), yakni orang yang memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan-pertanyaan itu.

Wawancara yang dilakukan pada saat penelitian skripsi dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber berdasarkan kegiatan minapolitan yang ada. Narasumber yang berkesempatan memberikan informasi pada saat penelitian adalah pihak Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar yaitu beberapa stafnya sebagai pelaksana serta masyarakat nelayan disekitar pelabuhan Muncar

sebagai penerima kegiatan. Berikut merupakan daftar responden yang berkesempatan untuk diwawancarai :

Tabel 2. Daftar Nama Responden

No.	Nama	Alamat	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	P. Supratman	Kedungrejo	50	L	Nelayan / Pengasin Ikan
2	P. Sutris	Kedungrejo	45	L	Nelayan / ABK
3	P. Ali	Tegaldlimo	55	L	Pedagang
4	P. Ali Mufi	Tembokrejo	35	L	Pedagang
5	P. Sueb	Tembokrejo	49	L	Nelayan / Pedagang
6	P. Ribut	Tembokrejo	45	L	Pedagang
7	P. Agus	Sampang	49	L	Pedagang
8	B. Sunariah	Kedungringin	55	P	Pedagang
9	P. Sholeh	Tembokrejo	55	L	Pedagang
10	P. Hendri	Kedungrejo	38	L	Nelayan / ABK
11	P. Sugik	Bangurejo	43	L	Nelayan / ABK
12	P. Hendrik	Kedungrejo	35	L	Nelayan / ABK
13	B. Suripah	Tembokrejo	60	P	Penimbang
14	P. Tamin	Kalimati	60	L	Penimbang
15	P. Slamet	Kalimati	60	L	Penimbang
16	P. Akhmad Supriono S.Pi	Tapan (Pulgowok)	51	L	PNS
17	P. Abidin S.Pi	Kedungrejo	55	L	PNS / Penyuluh
18	P. Winarto	Sumberayu	50	L	PNS
19	P. Hikmat	Duaraan	50	L	Nelayan / Juragan
20	P. Suroso	Kedungrejo	60	L	Nelayan / Juragan
21	P. Muslan	Kedungrejo	53	L	Nelayan / Juragan
22	P. Sungiri	Kedungrejo	53	L	Nelayan / Juragan
23	P. Mastur	Nggarahan	60	L	Nelayan / Juragan
24	P. Mursid	Kalimati	53	L	Nelayan / Juragan
25	P. Hapi	Sampang	52	L	Nelayan / Juragan
26	P. Suryadi	Kalimati	47	L	Nelayan
27	B. Sal	Kedungringin	47	P	Penimbang Ikan
28	B. Ida Triana Hanipan	Jl. Pelabuhan Muncar no. 1	41	P	PNS
29	P. Subiyanto	Jl. Pelabuhan Muncar	52	L	Kepala UPT Muncar
30	P. Suratmin	Sampang	52	L	Nelayan / Pengasin Ikan

c. Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)

Menurut Djaali dan Pudji Mujiono (2008), kuisisioner adalah alat pengumpul data yang berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Beberapa alasan digunakannya kuisisioner adalah :

- a. Kuisisioner terutama dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat faktual,
- b. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan
- c. Untuk memperoleh informasi dengan validitas dan realibilitas setinggi mungkin.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian skripsi yang telah dilakukan dibuat berdasarkan pokok bahasan tentang minapolitan yaitu berdasarkan kegiatan minapolitan perikanan tangkap yang ada di pelabuhan Muncar. Kuisisioner yang digunakan berisi bahasan dengan tujuan agar informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Daftar pertanyaan atau kuisisioner yang digunakan dalam penelitian skripsi yang telah dilakukan dapat dilihat pada lampiran 1 Kuisisioner Penelitian.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang dapat berasal dari instansi atau media massa yang biasanya diperoleh baik melalui perpustakaan maupun melalui instansi-instansi yang berwenang. Data ini merupakan data pendukung dari objek yang akan diteliti (Waluya, 2007). Data sekunder dapat diartikan pula sebagai data yang diperoleh dari data yang sudah ada sebelumnya. Pengambilan data untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mencari keterangan dari buku-buku dan literatur atau bisa dikatakan Studi Pustaka.

Dalam kegiatan penelitian skripsi ini teknik pengambilan data untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mencari keterangan dari buku-buku dan literatur yang di peroleh dari:

- Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan, Banyuwangi
- Kantor Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi
- Kantor Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi
- Perpustakaan
- Sosial media
- Literatur-literatur yang berkaitan dengan pelabuhan perikanan

Adapun data sekunder yang dikumpulkan antara lain :

- Keadaan umum lokasi penelitian skripsi,
- Kegiatan-kegiatan minapolitan dan seluruh hal yang berhubungan dengan minapolitan
- Keadaan sosial penduduk
- Struktur organisasi yang terkait dengan administrasi kepelabuhan
- dll

3.4. Metode Sampling

Metode sampling merupakan teknik pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Metode sampling menjadi dasar dan acuan dalam pengambilan sampel yang dilakukan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam melakukan sampling yaitu :

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Hartanto, 2003).

Populasi dapat diartikan pula sejumlah individu yang akan dikenai hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan ini mengambil dua karakteristik populasi yaitu pegawai UPT PP Muncar yang telah mengetahui semua program pengembangan kawasan Minapolitan selaku pelaksana program dan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pedagang selaku penerima program kegiatan atau pengguna fasilitas.

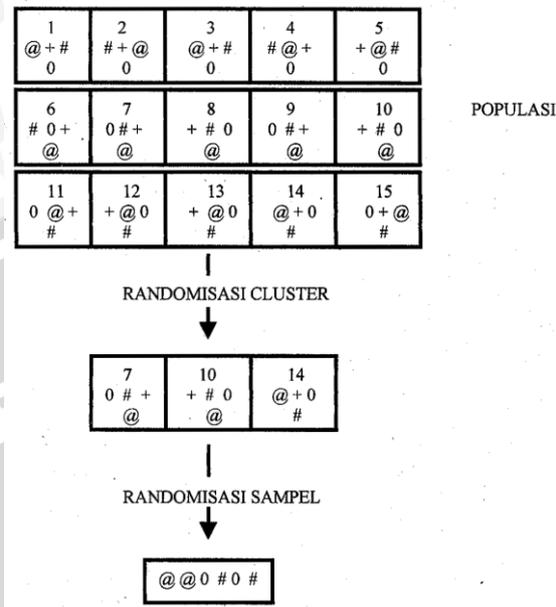
b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi (Hartanto, 2003). Sampel sendiri dapat diartikan sebagai bagian populasi yang langsung dikenai penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara *Probability Sample* atau random sampling dengan teknik sampling *Cluster / area random sampling*. Sampel area / wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari wilayah yang terdapat dalam populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pemilihan penggunaan teknik sampling *Cluster / area random sampling* dikarenakan lebih sesuai dengan kondisi lokasi penelitian yang dilakukan. Hartanto (2003) juga menyatakan penggunaan teknik ini dikarenakan populasi yang heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok yang didalamnya mengandung unit populasi yang heterogen. Keuntungannya adalah penyebaran unit populasi dapat ditekan. Tidak perlu daftar seluruh unit populasi, tetapi cukup daftar unit populasi pada cluster yang terpilih.

3.5. Ukuran Sampel

Menurut Hartanto (2003), *Cluster Random Sampling* digunakan apabila populasi heterogen dan terdiri dari kelompok-kelompok yang didalamnya mengandung unit populasi yang heterogen pula. Dari cluster-cluster diambil

sampel secara random. Berikut ini merupakan gambar contoh pengambilan sampel berdasarkan teknik *Cluster Random Sampling*



Gambar 2. Pengambilan Sampel Berdasarkan Teknik Cluster Random Sampling

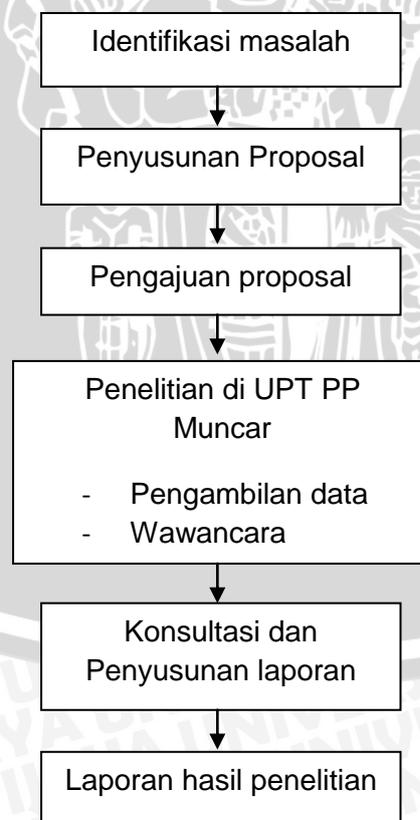
Menurut Singarimbun dan Effendy (1989) yang dikutip dari Yola dan Duwi (2013), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel, yaitu sebagai berikut:

- Tingkat presisi yang diinginkan (*Level of Precisions*). Dimana semakin tinggi tingkat presisi atau ketelitian yang diinginkan oleh seorang peneliti, semakin besar pula sampel yang harus diambil oleh peneliti.
- Derajat keseragaman (*Degree of Homogeneity*). Dimana semakin tinggi tingkat homogenitas populasi atau kesamaan populasi semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil oleh peneliti. Dan apabila semakin rendah tingkat homogenitas populasi maka semakin besar ukuran sampel yang harus diambil oleh peneliti.
- Banyaknya variabel yang akan diteliti dan rancangan analisis biaya, waktu, serta tenaga yang tersedia

Sedangkan berdasarkan statistik penelitian minimum sampel yang dapat digunakan dalam penelitian adalah 30 sampel. Sehingga sampel yang digunakan atau jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 30 responden atau sampel. Pengambilan atau pemilihan responden masyarakat pesisir dilakukan dengan cara memohon nama atau orang-orang sekitar pelabuhan yang dirasa mengetahui tentang minapolitan atau minimal tahu tentang pembangunan disekitar pelabuhan dan masyarakat pesisir yang menerima jasa atau melakukan kegiatan perikanan di pelabuhan kepada pihak kantor pelabuhan yang mengenal dengan baik masyarakat sekitar pelabuhan.

3.6. Alur Penelitian

Alur penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. Alur Penelitian

- a. Mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta/penerima kegiatan.

Pada pengambilan data untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta/penerima kegiatan pertama dibuat kuesioner berdasarkan kegiatan Minapolitan yang terdapat di Muncar (Lampiran 1. Kuesioner Penelitian, Kuesioner bagian A, hal 71). Sampel atau responden yang diambil sebanyak 30 dengan metode random sampling dengan teknik sampling *Cluster / area random sampling*. Responden yang diambil berasal dari pegawai UPT PP Muncar selaku pelaksana dan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pedagang selaku penerima.

Setelah wawancara dilakukan, hasil dari penelitian tersebut di analisis. Untuk analisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan tersebut diatas diukur dengan menggunakan skala likert dengan menyusun kategori tingkat kepentingan dan bobot nilainya (Tabel 3. Bobot antara Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja, Hal 36).

Tahapan selanjutnya hasil dari penilaian bobot jawaban dianalisis menggunakan metode IPA yaitu menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut-atribut yang diteliti melalui perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan (Analisis Data Rumus 1, Hal 34). Langkah selanjutnya menghitung rata-rata (titik koordinat) untuk setiap atribut yang dipersepsikan oleh konsumen (Analisis Data Rumus 2 dan 3, Hal 35). Kemudian dihitung rata-rata seluruh atribut tingkat kepentingan (Y) dan kinerja (X) yang menjadi batas dalam diagram kartesius (Analisis Data Rumus 4 dan 5, Hal 35). Terakhir menetapkan setiap atribut yang diteliti

berdasarkan diagram kartesius atau diagram IPA(Gambar 4. Pembagian Kuadran *Importance Performance Analysis (IPA)*, Hal 37)

- b. Mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan.

Pada pengambilan data untuk Mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan pertama dibuat kuesioner berdasarkan indikator keberhasilan program minapolitan(Lampiran 1. Kuesioner Penelitian, Kuesioner bagian B, Hal 72) dimana yang menjadi tolak ukur indikator keberhasilan adalah tujuan Minapolitan(Tujuan Minapolitan, Hal 7). Sampel atau responden yang diambil sebanyak 30 dengan metode random sampling dengan teknik sampling *Cluster / area random sampling*. Responden yang diambil berasal dari pegawai UPT PP Muncar selaku pelaksana dan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pedagang selaku penerima.

Setelah wawancara dilakukan, hasil dari penelitian tersebut di analisis. Untuk mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat pesisir terhadap kegiatan program pengembangan kawasan Minapolitan tersebut diatas diukur dengan menggunakan analisis deskriptif persentase yaitu berdasarkan jawaban responden yang menjawab “ya” atau “tidak”(Analisis Deskriptif, Hal 38)

- c. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam program pengembangan kawasan Minapolitan perikanan tangkap dapat dilihat dari kondisi umum lokasi penelitian baik keberadaan pelabuhan,

lingkungan, maupun SDM nya serta berdasarkan wawancara yang telah dilakukan.

3.7. Metode Analisa Data

3.7.1. Analisis Evaluatif

Penelitian evaluatif biasa diartikan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang akan dibandingkan dengan kriteria yang dianggap sesuai dan diambil kesimpulan. Kesimpulan inilah yang biasa disebut dengan hasil evaluasi. Penelitian evaluatif biasanya digunakan untuk mengumpulkan data tentang implementasi kebijakan atau mengetahui keterlaksanaan implementasi kebijakan.

Analisis evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis *Important Performance Analysis* (IPA) yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi kegiatan pengembangan kawasan Minapolitan. Pokok variabel yang menjadi acuan dan yang digunakan berdasarkan kegiatan yang ada di UPT PP Muncar adalah sebagai berikut :

Implementasi Kegiatan dan Penunjang Program Minapolitan

- Pembangunan Infrastruktur
 - a. Pembangunan Revenmen dan Reklame Tanah Dermaga deck on file Breakwater
 - b. Pembangunan Los Pasar Ikan Basah Sumberdaya Alam
 - c. Pembangunan Plengsengan/Talud
 - d. Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan (jalan)
 - e. Pembangunan dan peningkatan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh
 - f. Pengerukan kolam labuh

- Kegiatan Perikanan
 - a. Pengadaan rumpon laut dangkal
 - b. Bantuan Mesin Perahu
 - c. Bantuan Genset
 - d. Bantuan coolbox
 - e. Bantuan Perahu Motor
 - f. Bantuan Alat Tangkap dan Jaring Nelayan (jaring gillnet, jaring senar)
 - g. Pembuatan terumbu karang buatan
 - h. Reklamasi Pantai
 - i. Restocking SDI
 - j. Pembinaan KUD sekitar Lokasi Minapolitan
 - k. Penyuluhan bidang perikanan

Pokok variabel diatas merupakan program minapolitan sekaligus variabel yang digunakan dalam penelitian Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap.

3.7.1.1. Analisis Data

Hasil pengumpulan data akan dianalisis menggunakan *Importance Performance Analysis* (IPA). Seperti yang telah dikemukakan Santoso (2011) dalam Anggraeni, *et.al* (2014), tahapan pertama dalam metode *Importance Performance Analysis* (IPA) yaitu menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut-atribut yang diteliti melalui perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian adalah :

$$TKi = \frac{Xi}{Yi} \times 100 \% \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

TKi = tingkat kesesuaian responden

Xi = skor penilaian kinerja

Yi = Skor penelitian kepentingan

Tahap kedua yaitu menghitung rata-rata (titik koordinat) untuk setiap atribut yang dipersepsikan oleh konsumen dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{\sum n} \dots\dots\dots (2)$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum Yi}{\sum n} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana :

- \bar{X} = skor rata-rata tingkat kinerja
- \bar{Y} = skor rata-rata tingkat kepentingan
- n = Jumlah responden

Selanjutnya dihitung rata-rata tingkat seluruh atribut tingkat kepentingan (Y) dan kinerja (X) yang menjadi batas dalam diagram kartesius, dengan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum \bar{X}}{K} \dots\dots\dots (4)$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum \bar{Y}}{K} \dots\dots\dots (5)$$

Dimana :

X = Batas sumbu X (tingkat Kinerja)



Y = Batas sumbu Y (tingkat kepentingan)

K = banyaknya atribut yang mempengaruhi tingkat keberhasilan

Analisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan diukur dengan menggunakan skala likert dengan menyusun kategori tingkat kepentingan dan bobot nilainya menjadi seperti berikut :

Tabel 3. Bobot antara Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja

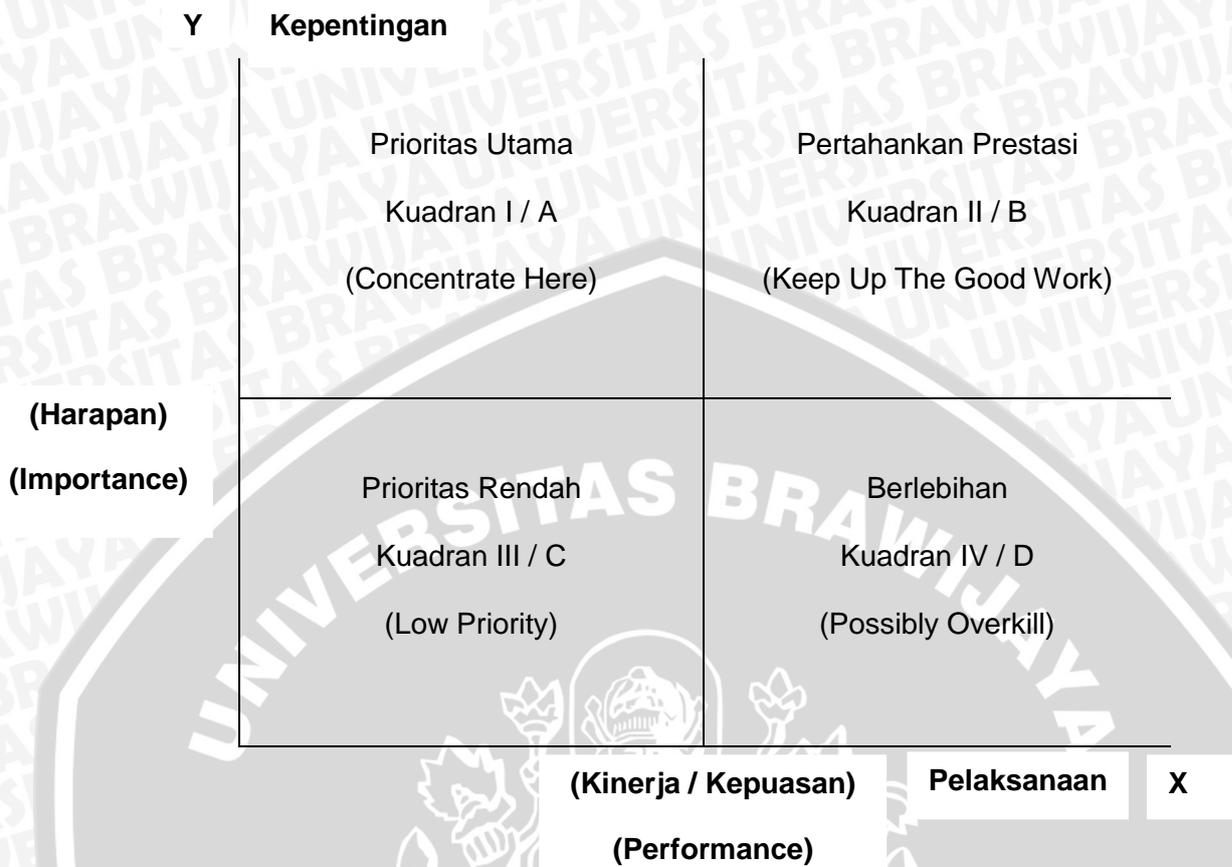
Bobot	Kepentingan (Y)	Kinerja (X)
1	Tidak Penting	Tidak Puas
2	Kurang Penting	Kurang Puas
3	Penting	Puas
4	Sangat Penting	Sangat Puas

Hal ini sesuai dengan pernyataan sugiyono (2012) *dalam* Ong dan Jati (2014) dimana menerangkan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat terhadap fenomena sosial yang dimana setiap jawaban item memiliki gradasi sangat positif (positif) sampai sangat negatif (negatif). Berikut adalah skala yang dapat dipakai pada penelitian:

- a. Tidak Setuju
- b. Kurang Setuju
- c. Setuju
- d. Sangat Setuju

Dalam kasus penelitian Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap ini menggunakan skala tingkat kepentingan dan tingkat kinerja/kepuasan.

Setelah data dianalisis tahap selanjutnya yaitu hasil dimasukkan kedalam diagram kartesius berdasarkan ukuran dan hasil yang telah didapat seperti diagram kartesius atau diagram IPA seperti gambar berikut ini:



Gambar 4. Pembagian Kuadran *Importance Performance Analysis (IPA)*

Hasil pengolahan data dianalisis berdasarkan posisi didalam kuadran-kuadran tersebut dengan penjelasan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Kuadran I / A : Prioritas Utama (*Concentrate Here*)

Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan atau diharapkan akan tetapi kinerja dinilai belum memuaskan sehingga pemerintah perlu berkonsentrasi guna meningkatkan performa atau kinerja disektor tersebut.

Kuadran II / B : Pertahankan Prestasi (*Keep Up The Good Work*)

Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan sehingga wajib untuk mempertahankan prestasi kinerja tersebut.

Kuadran III / C : Prioritas Rendah (*Low Priority*)

Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan sehingga pemerintah tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut.

Kuadran IV / D : Berlebihan (*Possibly Overkill*)

Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan sehingga pemerintah lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada faktor tersebut kepada faktor lain yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi.

3.7.2. Analisis Deskriptif

Menurut Nursalam (2007), Analisis deskriptif adalah suatu prosedur pengolahan data dengan menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk table atau grafik. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi, proporsi, dan rasio, ukuran-ukuran variasi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase. Deskriptif presentase ini diolah dengan cara frekuensi yang menjawab “ya” atau “tidak” dibagi dengan jumlah responden dikali 100% hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Riduan (2004) yang dikutip dari Trianjaya (2012) yang menyatakan langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek atau sub variable
2. Merekap nilai
3. Menghitung nilai rata-rata
4. Menghitung presentase dengan rumus:.

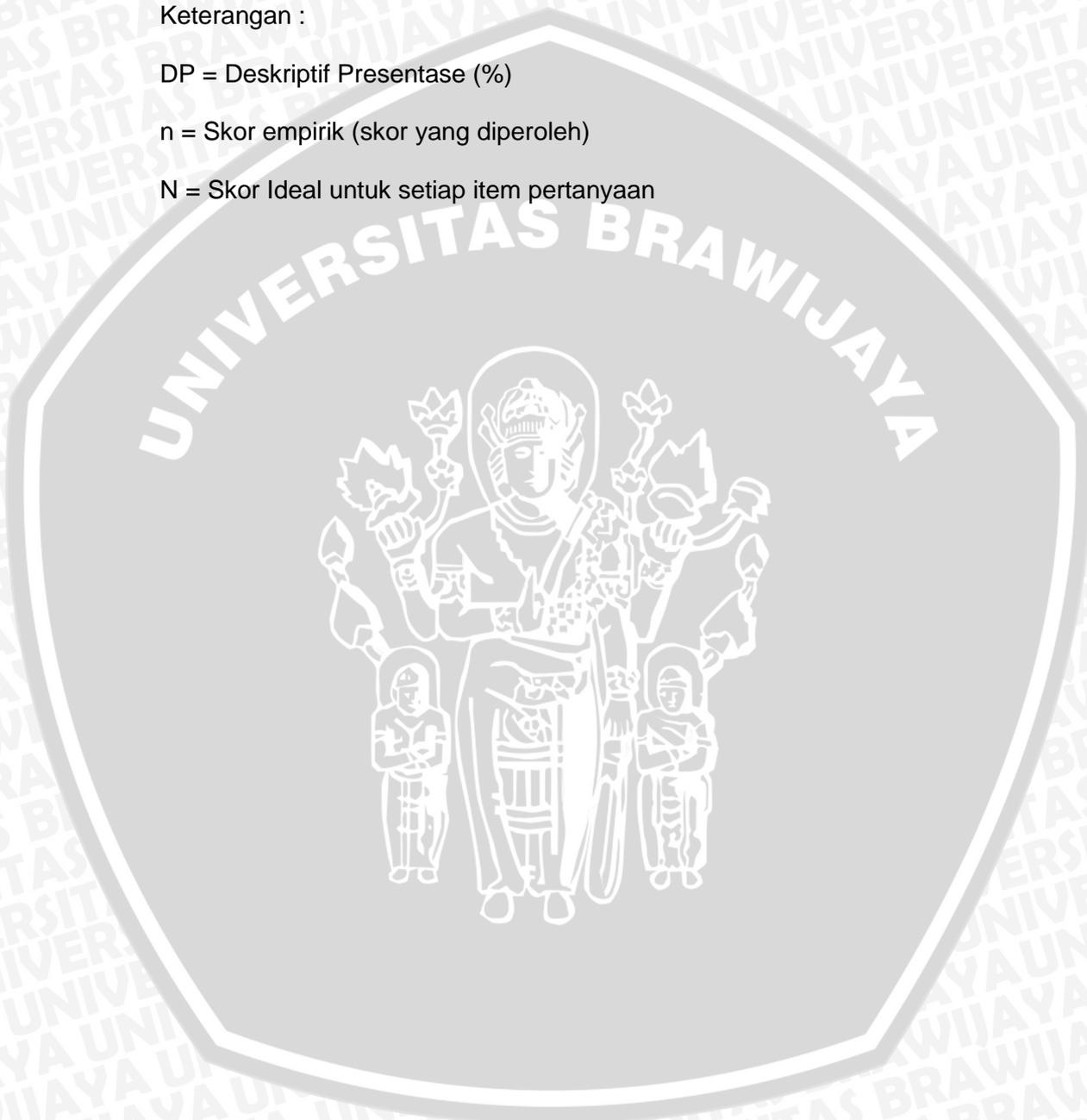
$$DP = \frac{n}{N} \times 100 \% \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

DP = Deskriptif Presentase (%)

n = Skor empirik (skor yang diperoleh)

N = Skor Ideal untuk setiap item pertanyaan



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling timur dari wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak di antara koordinat 07°43 - 8°46 Lintang Selatan dan 113°53 - 144°38 Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 578.250 Ha atau 5.782,50 Km² serta panjang garis pantai sekitar 175,8 km yang membujur sepanjang batas selatan-timur Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Situbondo dan Bondowoso

Timur : Selat Bali

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso

Tabel 4: Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Luas daerah (km ²)	Prosentase luas
1.	Pesanggaran	802,50	13,9 %
2.	Siliragung	95,50	1,6 %
3.	Bangorejo	137,43	2,4 %
4.	Purwoharjo	200,30	3,5 %
5.	Tegaldlimo	1.341,12	23,3 %
6.	Muncar	146,07	2,5 %
7.	Cluring	97,44	1,7 %
8.	Gambiran	66,77	1,2 %
9.	Tegalsari	65,23	1,1 %
10.	Glenmore	421,98	7,3 %
11.	Kalibaru	406,76	7,0 %
12.	Genteng	82,34	1,4 %
13.	Srono	100,77	1,7 %
14.	Rogojampi	102,33	1,8 %
15.	Kabat	107,48	1,9 %
16.	Singojuruh	59,89	1,0 %
17.	Dan 7 kec. Lain	1.548,59	26,7 %
	Jumlah	5.782,50	100,0 %

Sumber: Banyuwangi dalam Angka, 2011

Wilayah Banyuwangi terbagi atas beberapa bagian, dimana bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan. Dataran yang datar dengan berbagai potensi yang berupa produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Muncar

Muncar merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Selat Bali pada posisi $08^\circ.10' - 08^\circ.50' \text{ LS}$ atau $114^\circ.15' - 115^\circ.15' \text{ BT}$ yang mempunyai teluk bernama Teluk Pangpang dan mempunyai panjang pantai $\pm 13 \text{ km}$ dengan pendaratan ikan sepanjang $5,5 \text{ km}$. Sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Muncar adalah sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Srono
- Timur : Selat Bali
- Selatan : Kecamatan Tegaldlimo
- Barat : Kecamatan Cluring

Tabel 5: Luas wilayah Desa di Kecamatan Muncar

No	Kecamatan	Luas daerah (km ²)	Prosentase luas
1.	Sumberberas	9,43	12,26%
2.	Kedungrejo	6,64	8,63%
3.	Tembokrejo	5,48	7,13%
4.	Sumbersewu	5,05	6,57%
5.	Blambangan	7,06	9,18%
6.	Tapanrejo	10,41	13,54%
7.	Wringinputih	15,24	19,82%
8.	Tambakrejo	7,48	9,73%
9.	Kedungringin	4,74	6,16%
10	Kemendung	5,37	6,98%
	Jumlah	76,90	100,00%

Sumber: Banyuwangi dalam Angka, 2011

4.1.3. Gambaran Umum Desa Kedungrejo

Desa Kedungrejo sendiri memiliki ketinggian dari permukaan laut antara 0-450 m. Desa Kedungrejo secara keseluruhan merupakan daerah pantai yang memiliki iklim panas dengan suhu rata-rata 31 °C dan curah hujan rata-rata setiap tahun 2.280 mm.

Bersasarkan data yang didapatkan, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Desa Kedungrejo secara keseluruhan adalah 25.897 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13.039 jiwa dan perempuan sebanyak 12.858 jiwa.

Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Kedungrejo bervariasi, mulai dari tidak bersekolah hingga tamat perguruan tinggi. Dari data yang telah didapat sebagian besar penduduk Desa Kedungrejo telah mengenyam pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Belum Sekolah	394
2.	Tidak Tamat Sekolah	122
3.	Tamat SD / Sederajat	8.349
4.	Tamat SLTP / Sederajat	5.647
5.	Tamat SLTA / Sederajat	7.769
6.	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	3.616
Total		25.897

Sumber : Data Anatomi Desa Kedungrejo, 2012

Mata pencaharian masyarakat Desa Kedungrejo sangat bervariasi dan sebagian besar merupakan nelayan. Hal ini mungkin dikarenakan Desa Kedungrejo sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Secara rinci data penduduk berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	423
2.	Buruh Tani	3.733
3.	Nelayan	4.102
4.	Pedagang	939
5.	Pegawai Negeri	234
6.	TNI / POLRI	82
7.	Pensiunan	98
8.	Tukang Kayu	72
9.	Tukang Jahit	54
10.	Sopir	34
11.	Lain-lain	16.126
Total		25.897

Sumber : Data Anatomi Desa Kedungrejo, 2012

4.2. Kawasan Minapolitan

Kawasan yang dijadikan wilayah pengembangan Minapolitan berbasis perikanan tangkap dengan struktur kewilayahan di Banyuwangi adalah pelabuhan perikanan Muncar, tepatnya berada di Kecamatan Muncar. Kecamatan Muncar adalah sentra dari kawasan minapolitan untuk Kabupaten

Banyuwangi. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/852/KEP/429/011/2010 tentang penetapan lokasi minapolitan di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan lokasi minapolitan terletak di Kecamatan Muncar dengan UPT PP Muncar (yang berada di Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo) mulai tahun 2011 menjadi Zona Inti dari Kawasan Minapolitan dan ditetapkan pula 2 (dua) Zona Pendukung yaitu 1) Zona Sentra Produksi(Kecamatan Purwoharjo, dan Kecamatan Pesanggrahan) 2) Zona Penyangga(Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, dan Kecamatan Tegaldlimo). Sejak tahun 2011 pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sudah gencar mengembangkan sektor kelautan dan perikanan didaerah setempat lewat pembangunan sentra Minapolitan di Pelabuhan Muncar.

4.2.1. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar berada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar terletak di daerah yang cukup strategis, dengan jarak pelabuhan Muncar dengan ibukota kecamatan 2 km, dengan ibukota kabupaten 37 km, dan dengan ibukota propinsi 332 km serta kondisi jalan yang beraspal dan lokasi yang cukup mudah ditemukan, hal ini membuat akses ke Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar menjadi lebih mudah.

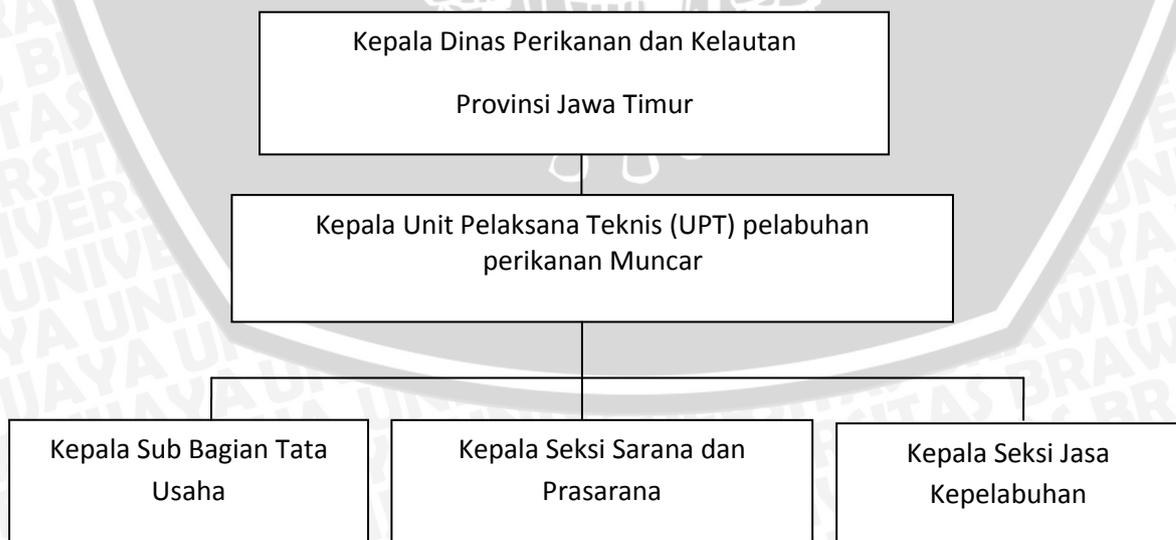
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis (U.P.T) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yang pada awalnya merupakan Daerah Kerja Khusus Perikanan Muncar, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1984. Kemudian pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah

Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1993 yang awalnya merupakan Daerah Kerja Khusus Perikanan Muncar berubah menjadi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) Muncar.

Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 12/MK/2004 kemudian ditingkatkan statusnya dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), kemudian menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPPPP) Muncar pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor : 061/6614/116.01/2010 dan memiliki konsep pelabuhan perikanan minapolitan. Kemudian sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur 31 Th 2014 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berubah menjadi Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan (PP) Muncar.

4.2.1.1. Struktur Organisasi

Bagan struktur atau susunan organisasi di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Struktur Organisasi UPT-PP Muncar

Sumber : Kantor UPT-PP Muncar / Profil UPT-PP Muncar, 2014

Berdasarkan bagan diatas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur memiliki kedudukan tertinggi sebagai pengatur dan pengawas dari kegiatan perikanan di Muncar. Kemudian Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan kewenangan kepada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang diketuai oleh kepala pelabuhan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala dinas. Kepala pelabuhan memiliki kewajiban menjalankan fungsinya sebagai ketua pelabuhan, mengawasi kerja dari tiap kepala sub bagian serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada kepala dinas dan setiap sub bagian memiliki kewajiban menjalankan tugasnya dengan baik, mengelola dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada ketua pelabuhan. Tugas dari setiap sub bagian adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha

- Menyusun rencana evaluasi dan pelaporan
- Penata kepegawaian dan rumah tangga
- Bendahara penerima pembantu
- Bendahara pengeluaran pembantu
- Pengadministrasi keuangan
- Pengadministrasi umum
- Pembantu pengurus barang
- Pengemudi
- Pramu Kantor

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan

- Pengelola pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan
- Operator mesin dan listrik
- Petugas pelaksana K5

c. Seksi Jasa Kepelabuhan

- Koordinator Instalasi pelabuhan perikanan

- Pengelola pengembangan jasa kepelabuhan
- Petugas kesyahbandaran
- Petugas log book, PIPP, SHTI/SKPI
- Petugas tambat labuh
- Petugas inspeksi pembongkaran ikan

4.2.1.2. Fasilitas Pelabuhan

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk semua kegiatan di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini memiliki fungsi sebagai penjamin keamanan dan kelancaran kapal ketika berlayar keluar atau masuk pelabuhan maupun sewaktu melakukan tambat dan labuh di pelabuhan.

Fasilitas-fasilitas pokok ini antara lain :

Tabel 8. Fasilitas Pokok UPT-PP Muncar

No.	Fasilitas Pokok	Luas
1.	Lahan	177.500 m ²
	- PPP Muncar	13.800 m ²
	- Reklamasi	41.200 m ²
	- Reklamasi	22.500 m ²
	- Reklamasi	25.000 m ²
2.	Kolam PP Muncar	25,8 Ha
	- Lama	5,1 Ha
	- Baru	20,7 Ha
3.	TPI Kalimoro (Reklamasi)	1.525 m ²
4.	Jetty/Pier	800 m ²
5.	Turap Kalimati	500 m ²
6.	Pemecah Gelombang / Breakwater	170 m
7.	Tembok Penahan Tanah	800 m
8.	Dermaga	813 m
9.	Jalan Komplek	3.000 m
10.	Slipway	360 m
11.	Jembatan Penghubung desa	82 m ²
Dan Lainnya		

Sumber : Kantor UPT-PP Muncar / Profil UPT-PP Muncar, 2014

b. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna serta menunjang fungsi dari fasilitas pokok yang dapat menunjang aktivitas pelabuhan. Fasilitas-fasilitas fungsional tersebut antara lain :

Tabel 9. Fasilitas Fungsional UPT-PP Muncar

No.	Fasilitas Fungsional	Luas
1.	Gedung : TPI Pelabuhan TPI Kalimoro TPI Tratas TPI Sampangan	1450,0 m ² 200,0 m ² 200,0 m ² 200,0 m ²
2.	Kantor UPT-PP	662,5 m ²
3.	G. Serba Guna	465,0 m ²
4.	G. Aula	322,5 m ²
5.	G. Peralatan	300,0 m ²
6.	Rumah Tangki BBM	50,0 m ²
7.	Rumah Genzet	36,0 m ²
8.	Rumah Pompa	30,0 m ²
Dan Lainnya		

Sumber : Kantor UPT-PP Muncar / Profil UPT-PP Muncar, 2014

c. Fasilitas Penunjang atau Tambahan

Fasilitas Penunjang merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja di pelabuhan perikanan. Ada beberapa fasilitas penunjang yang sangat penting keberadaannya yang akan menunjang kinerja di Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar yaitu :

Tabel 10. Fasilitas Penunjang / Pendukung UPT-PP Muncar

No.	Fasilitas Penunjang	Luas
1.	Kantor KUD Mino	34,5 m ²
2.	Mess Operator	62,0 m ²
3.	Kantor POLAIR	42,0 m ²
4.	Rumah Dinas POLAIR	64,0 m ²
5.	Kantor SYAHBANDAR	64,0 m ²
6.	Balai Kesehatan	154,0 m ²
7.	Musholla	56,0 m ²
Dan Lainnya		

Sumber : Kantor UPT-PP Muncar / Profil UPT-PP Muncar, 2014

4.2.1.3. Keadaan Perikanan

Keadaan perikanan di Muncar mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang melatar belakangnya baik dari nelayan, armada kapal, alat penangkapan dan lainnya. Potensi perikanan pada lima tahun terakhir di Muncar dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 11. Potensi Perikanan di Kecamatan Muncar Lima Tahun Terakhir

No.	Keterangan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Nelayan	13.360	13.186	13.123	13.143	13.203
2.	Armada Kapal (Unit)	1.871	1.874	1.866	1.835	1.783
3.	Alat Penangkap Ikan (Unit)	2.124	1.130	2.128	2.163	2.091
4.	Pengolahan (Unit)	216	265	260	258	258
5.	Jenis Ikan Dominan	Lemuru, Layang	Lemuru, Ubur, Layang, Tongkol	Lemuru, Layang, Tongkol	Lemuru, Layang, Tongkol	Lemuru, Layang, Tongkol

Keterangan :

Lemuru : *Sardinella lemuru*

Ubur-ubur : *Aurelia sp.*

Layang : *Decapterus macrosoma*

Tongkol : *Euthynnus sp.*

Sumber : Kantor UPT-PP Muncar / Profil UPT-PP Muncar, 2014

Data tersebut menunjukkan perubahan jumlah nelayan pertahunnya, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan, begitu pula dengan armada kapal yang terus naik dan turun dengan selisih yang tidak terlalu signifikan pula. Pada data juga terlihat jumlah alat penangkapan ikan menurun drastis pada tahun 2011 begitu pula dengan jumlah jenis pengolahan yang paling besar terjadi di tahun 2011, tetapi jenis ikan dominan yang menjadi hasil tangkapan hampir semua menunjukkan lemuru menjadi hasil tangkapan utama di tiap tahunnya.

4.2.2. Pengelola Minapolitan

Kelompok kerja pengelola minapolitan dapat dilihat pada surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/1564/KEP/429.011/2011 tanggal 30 Desember 2011 atas perubahan keduanya yaitu surat keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/901/KEP/429.011/2010 dimana susunan personalia kelompok kerja (POKJA) minapolitan kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. POKJA Minapolitan Kabupaten Banyuwangi

No.	Jabatan Dalam POKJA	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Bupati Banyuwangi
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Banyuwangi
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi
5.	Koordinator Bidang Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
6.	Koordinator Bidang Pemberdayaan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar
7.	Anggota	a. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyuwangi b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banyuwangi c. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Banyuwangi d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengeiran Kab. Banyuwangi e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kab. Banyuwangi f. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kab. Banyuwangi g. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi h. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi i. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi

No.	Jabatan Dalam POKJA	Keterangan
7.	Anggota	j. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi k. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Banyuwangi l. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi m. Kepala Balai Pendidikan dan Peatihan Perikanan Banyuwangi

4.3. Importance Performance Analysis (IPA)

Importance Performance Analysis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan berbasis ekonomi berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap kinerja program pengembangan kawasan minapolitan.

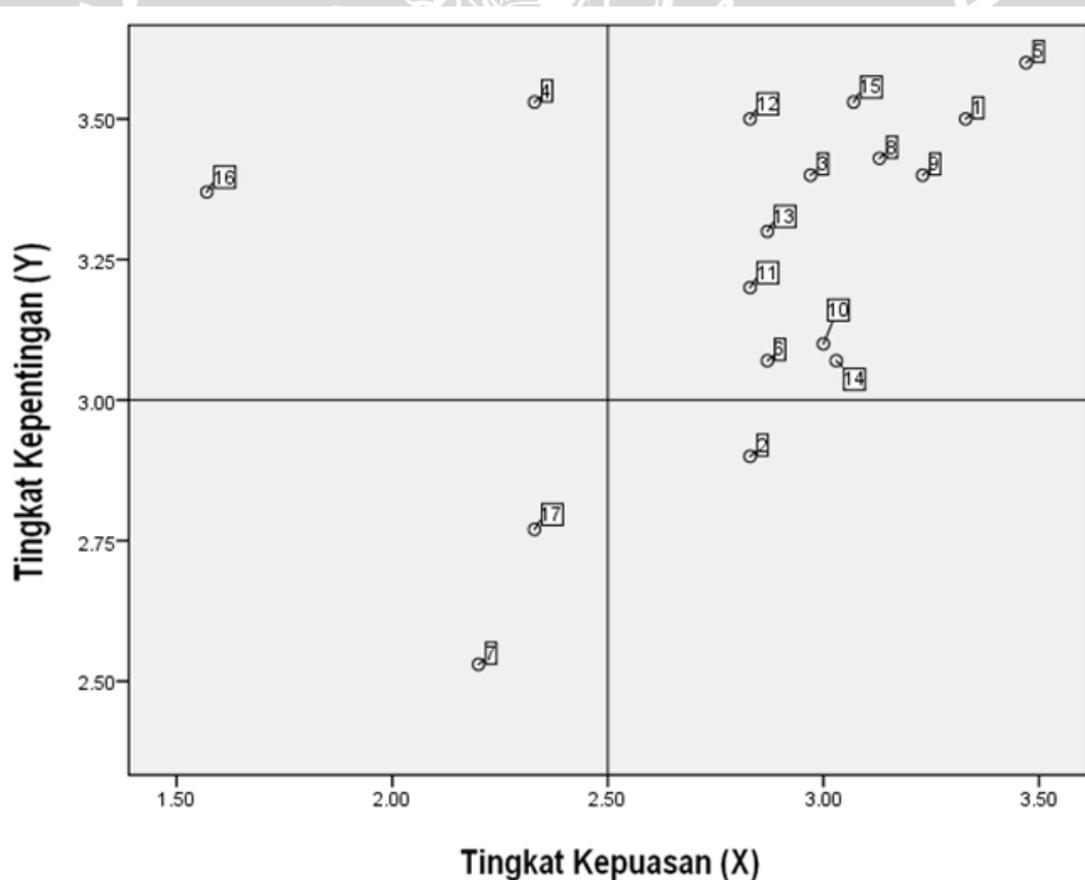
Berdasarkan hasil penelitian yaitu berdasarkan nilai tingkat kepentingan dan kepuasan yang didapat dari program pengembangan kawasan minapolitan dapat dilihat hasil kinerja dari masing-masing program yang mana dapat dijadikan acuan dalam memprioritaskan suatu kebijakan yang sesuai dan membuat kebijakan baru.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Bobot Skor serta Rata-rata Tingkat Kepuasan (X) dan Kepentingan (Y)

No.	Program	Bobot Skor X	Bobot Skor Y	Nilai X	Nilai Y
1.	Pembangunan Revenmen dan Reklame Tanah Dermaga deck on file Breakwater	100	105	3.33	3.50
2.	Pembangunan Los Pasar Ikan Basah Sumberdaya Alam	85	87	2.83	2.90
3.	Pembangunan Plengsengan/Talud	89	102	2.97	3.40
4.	Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur, di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan (jalan)	70	106	2.33	3.53
5.	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh	104	108	3.47	3.60
6.	Pengerukan kolam labuh	86	92	2.87	3.07
7.	Pengadaan rumpon laut dangkal	66	76	2.20	2.53
8.	Bantuan Mesin Perahu	94	103	3.13	3.43

No.	Program	Bobot Skor X	Bobot Skor Y	Nilai X	Nilai Y
9.	Bantuan coolbox	97	102	3.23	3.40
10.	Bantuan Genset	90	93	3.00	3.10
11.	Bantuan Perahu Motor (Jukung)	85	96	2.83	3.20
12.	Bantuan Alat Tangkap dan Jaring Nelayan (jarring gillnet, Jaring senar atau setet)	85	105	2.83	3.50
13.	Pembuatan terumbu karang buatan	86	99	2.87	3.30
14.	Reklamasi Pantai	91	92	3.03	3.07
15.	Restocking SDI	92	106	3.07	3.53
16.	Pembinaan KUD sekitar Lokasi Minapolitan	47	101	1.57	3.37
17.	Penyuluhan Bidang Perikanan	70	83	2.33	2.77

Hasil perhitungan rata-rata bobot skor x dan y di atas di masukkan kedalam diagram IPA dengan menggunakan program aplikasi SPSS 16, yang hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 6: Diagram IPA Hasil Penelitian

Berdasarkan gambar diagram IPA tersebut diatas maka hasil pengolahan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuadran A

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dimana setiap variabel-variabel yang terdapat dalam kuadran A maka variabel atau faktor tersebut dianggap penting dan atau diharapkan dikarenakan nilai kepentingan (Y) tinggi akan tetapi kinerja dinilai belum memuaskan sehingga pemerintah perlu berkonsentrasi guna meningkatkan performa atau kinerja di sektor tersebut.

Dalam penelitian yang telah dilakukan untuk melihat kegiatan mana dari program pengembangan kawasan minapolitan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dan tingkat kepuasan yang rendah maka dapat dilihat pada kuadran 1 atau kuadran A dimana terdapat 2 komponen yang masuk dalam kuadran tersebut yang mana menjadi prioritas utama yaitu:

1. Variabel 4 : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan (jalan)
2. Variabel 16 : Pembinaan KUD sekitar Lokasi Minapolitan

Berdasarkan hasil yang didapat diatas maka pemerintah berkewajiban lebih memperhatikan dan melakukan perbaikan kembali pada kedua kegiatan tersebut dikarenakan kedua variabel tersebut memiliki tingkat kepuasan yang sangat rendah tetapi tingkat kepentingan yang tinggi dan diharapkan selanjutnya agar pemerintah dapat memperbaiki kembali sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan atau program tersebut meningkat.

Variabel 5 merupakan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja operasional pelabuhan yaitu jalan. Jalan disepanjang wilayah kerja operasional pelabuhan terdiri dari jalan bertanah dan beraspal. Kondisi

jalan sudah dalam keadaan yang cukup baik namun di beberapa lokasi mengalami kerusakan dan sebagian lagi berbatu serta berpasir. Namun meskipun begitu kegiatan lalu lintas didalam wilayah kerja operasional pelabuhan tetap berjalan dengan lancar.

Variabel 16 merupakan program pembinaan KUD sekitar lokasi Minapolitan yaitu KUD Mino Blambangan dimana kantornya terletak di Jln. Pelabuhan no. 1 Muncar. KUD Mino Blambangan adalah KUD yang terletak di lingkungan kawasan minapolitan dimana merupakan Koperasi Unit Desa selaku badan hukum yang dipercaya pada tahun 2008 oleh Bupati Banyuwangi bertanggung jawab terhadap retribusi peyelangan selain itu melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan nelayan. Tetapi berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, narasumber menjelaskan bahwa KUD Mina Blambangan sudah lama sejak setelah tahun 2013 tidak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya atau berhenti beroperasi.

2. Kuadran B

Kuadran B adalah kuadran yang memuat hal yang dianggap penting dan telah sesuai dengan kinerjanya oleh para responden. Beberapa kegiatan yang masuk kedalam kuadran ini dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat hampir keseluruhan kegiatan yaitu 12 kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yang mana ke 12 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel 1 : Pembangunan Reventmen dan reklame tanah dermaga deck on pile Breakwater sisi timur
2. Variabel 3 : Pembangunan Plengsengan / Talud
3. Variabel 5 : Pelabuhan dan Peningkatan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh
4. Variabel 6 : Pengerukan kolam labuh

5. Variabel 8 : Bantuan mesin perahu
6. Variabel 9 : Bantuan coolbox
7. Variabel 10 : Bantuan Genset
8. Variabel 11 : Bantuan perahu Motor
9. Variabel 12 : Bantuan alat tangkap dan jarring nelayan
10. Variabel 13 : Pembuatan terumbu karang buatan
11. Variabel 14 : Reklamasi pantai
12. Variabel 15 : Restocking SDI

Berdasarkan hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa ke 12 program kegiatan kawasan minapolitan berada pada kuadaran 2 atau B yang mana berarti tingkat kepentingan dan kepuasan ke 14 program kegiatan telah sesuai harapan responden sehingga hal ini perlu dipertahankan oleh pihak pelaksana dan pemerintah agar selanjutnya tingkat kinerja tidak berubah dan tetap memberikan tingkat kepuasan yang tinggi.

Variabel 1 merupakan pembangunan Reventmen dan reklame tanah dermaga deck on pile Breakwater sisi timur. Kegiatan pembangunan reventmen dan reklame tanah dermaga deck on pile breakwater sisi timur meruakan program penunjang minapolitan. Bangunan ini dibangun. Variabel 3 merupakan Pembangunan Plengsengan / Talud. Bangun ini berbentuk persegi empat, datar dan menjorok keluar pada lereng miring. Pembangunan plengsengan atau talud ini berada di sepanjang tambat labuh. Plengsengan atau talud ini berfungsi sebagai tanjakan.

Variabel 5 Pelabuhan dan Peningkatan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh, kolam labuh. Keberadaan pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh dan kolam labuh di Muncar terdapat dua lokasi utama yaitu baru dan lama. Lokasi lama berada disebelah Selatan kantor pelabuhan sedangkan yang baru berada disebelah Timur kantor pelabuhan Muncar. Keadaan

pelabuhan pendaratan ikan, tambat labuh dan kolam labuh yang baru sudah baik dan tambat labuh serta kolam labuh sudah dipergunakan sebagaimana mestinya. Variabel 6 Pengerukan kolam labuh. Kegiatan pengerukan kolam labuh dilakukan hampir diseluruh kolam labuh yan terdapat di pelabuhan Muncar. Fungsi dari pengerukan kolam labuh sendiri adalah untuk mengurangi pengendapan lumpur dikolam labuh sehingga kapal tidak terdampar. Kegiatan pengerukan kolam labuh biasa dilakukan 1 tahun sekali.

Variabel 8, 9, 10, 11, dan 12 yaitu bantuan mesin perahu, bantuan coolbox, bantuan genset, bantuan perahu motor, serta bantuan alat tangkap dan jaring nelayan. Bantuan ini diberikan pemerintah sebagai salah satu dari program pengembangan perikanan tangkap dan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan di pelabuhan Muncar. Variabel 13 dan 15 yaitu pembuatan terumbu karang buatan dan restocking SDI. Kedua kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperbaharui sumberdaya ikan atau pengkayaan sumberdaya ikan. Variabel 14 Reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai bertujuan untuk memperluas daratan yang diambil dari wilayah perairan yang dijadikan daratan. Lokasi daratan hasil reklamasi pantai yang ada di sekitar wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan pantai muncar yaitu tanah dermaga tambat laut sisi timur yang baru.

3. Kuadran C

Kuadran 3 atau kuadran C adalah kuadran dimana setiap komponen yang berada didalamnya maka komponen tersebut dinyatakan kurang penting dan kinerjanya dianggap biasa-biasa saja bagi responden. Dalam pengolahan data hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dalam diagram IPA dimana terdapat 2 variabel yang masuk kedalam kuadran ini, kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel 7 : Pengadaan rumput laut dangkal
2. Variabel 17 : Penyuluhan bidang perikanan

Berdasarkan hasil yang didapat diatas kedua program tersebut dianggap tidak begitu penting dan kinerja yang dilakukanpun biasa-biasa saja. Tetapi meski tidak begitu penting tetapi kedua kegiatan masih memiliki nilai kepentingan sehingga kedua kegiatan ini masih perlu dilanjutkan akan tetapi tingkat kinerjanya harus sesuai dengan tingkat kepentingan dari program. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa kedua program tersebut tidaklah harus diprioritaskan.

Variabel 7 Pengadaan rumput laut dangkal. Kegiatan pengadaan rumput laut dangkal biasanya berdasarkan pada permohonan nelayan yang membutuhkan. Dengan cara membuat permohonan kepada desa lalu akan dirapatkan di kecamatan dan diajukan dan dirapatkan kembali di kabupaten. Hal ini sesuai dengan tata cara yang benar dan berlaku untuk semua jenis permohonan barang. Variabel 17 Penyuluhan bidang perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di sekitar kawasan minapolitan berdasarkan wawancara terhadap pihak pelabuhan menerangkan bahwa kegiatan ini jarang dilakukan. Berdasarkan beberapa nelayan yang berkesempatan menjadi narasumber atau responden menerangkan bahwa tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pelaksana kegiatan sehingga beberapa nelayan tidak tahu menahu. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak DKP Banyuwangi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mendatangi rumah-rumah nelayan, penggunaan baleho besar dan pertemuan besar atau seminar yang biasanya dilaksanakan setidaknya 20 kali dalam setahun.

4. Kuadran D

Kuadran 4 atau D merupakan kuadran dimana setiap komponen atau program yang berada dalam kuadran ini akan memiliki nilai kepentingan yang rendah tetapi nilai kinerjanya tinggi. Dalam pengolahan data didapatkan hasil yang dapat dilihat dalam diagram IPA bahwa program kegiatan yang masuk kedalam kuadran ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel 2 : Pembangunan Los Pasar Ikan Basah

Berdasarkan hal ini sehingga diharapkan perlu mengalokasikan sebagian sumberdaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pada kuadran ini kepada program lain yang memiliki tingkat proiritas yang lebih tinggi.

Variabel 2 Pembangunan Los pasar ikan basah. Los pasar ikan basah terdapat di sebelah utara kantor pelabuhan perikanan Muncar. Pasar ikan basah bersebelahan dengan pasar ikan kering atau asin. Penjual ikan basah berjejer disepanjang jalan area pasar.

4.3.1. Tingkat Kesesuaian (%)

Tingkat kesesuaian digunakan untuk melihat persentase kepuasan berdasarkan antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja program. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesesuaian ini adalah dengan menggunakan rasio atau perbandingan antara penilaian kinerja dengan kepentingan setiap variabel minapolitan. Tingkat kesesuaian dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TKi = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Dimana:

TKi = tingkat kesesuaian responden

Xi = skor penilaian kinerja

Y_i = Skor penelitian kepentingan

Berikut ini merupakan hasil analisis tingkat kesesuaian berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan setiap program pengembangan kawasan minapolitan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Tingkat Kesesuaian

Variabel	Kinerja (Puas)	Kepentingan	Tki (%)	Keterangan
1.	3.33	3.50	95.24	Puas
2.	2.83	2.90	97.70	Puas
3.	2.97	3.40	87.25	Puas
4.	2.33	3.53	66.04	Puas
5.	3.47	3.60	96.30	Puas
6.	2.87	3.07	93.48	Puas
7.	2.20	2.53	86.84	Puas
8.	3.13	3.43	91.26	Puas
9.	3.23	3.40	95.10	Puas
10.	3.00	3.10	96.77	Puas
11.	2.83	3.20	88.54	Puas
12.	2.83	3.50	80.95	Puas
13.	2.87	3.30	86.87	Puas
14.	3.03	3.07	98.91	Puas
15.	3.07	3.53	86.79	Puas
16.	1.57	3.37	46.53	Tidak Puas
17.	2.33	2.77	84.34	Puas

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat 1 (satu) variabel yang memiliki nilai TKi (tingkat kesesuaian) sebesar 46.53% yaitu variabel 16 pembinaan KUD sekitar lokasi minapolitan. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih cenderung tidak puas terhadap kegiatan atau program ini. Kemudian terdapat 1 (satu) program dimana memiliki nilai TKi sebesar 66.04% yaitu variabel 4 Pembangunan dan peningkatan infrastruktur, di wilayah kerja operasional pelabuhan (jalan) yang mana kegiatan atau program ini hampir mendekati nilai tidak puas. Sehingga perlu perbaikan kinerja program agar kegiatan atau kebijakan ini menjadi lebih baik dan memberikan nilai kepuasan yang tinggi. Kemudian untuk keseluruhan kebijakan atau variabel selain variabel

16 menunjukkan kepuasan dengan TKi tetinggi terdapat pada variabel 14 Reklamasi Pantai dengan nilai TKi 98.91%.

4.4. Tingkat Perubahan yang Dirasakan oleh Masyarakat Pesisir

Tingkat perubahan yang dirasakan masyarakat pesisir teradap kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan di UPT-PP Muncar dapat diketahui dengan memberikan item pertanyaan kepada masyarakat sekitar UPT-PP Muncar dimana item pertanyaan ini didapat dari atau mengacu pada tujuan dari diadakannya kegiatan pengembangan kawasan minapolitan(Tujuan Minapolitan, Hal 7). Setelah didapatkan hasil wawancara maka untuk mengetahui tingkat perubahan yang dirasakan masyarakat pesisir langkah selanjutnya yaitu :

1. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek atau sub variable
2. Merekap nilai
3. Menghitung nilai rata-rata
4. Menghitung presentase dengan rumus:..

$$DP = \frac{n}{N} \times 100 \% \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan :

DP = Deskriptif Presentase (%)

n = Skor empirik (skor yang diperoleh)

N = Skor Ideal untuk setiap item pertanyaan

Dimana hasil dari analisis kuisioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Hasil Analisis Deskriptif Kuisioner

Item Pertanyaan	Ya		Tidak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1	21	69.99	9	30.01
2	30	100.00	0	0
3	25	83.33	5	16.67
4	18	59.99	12	40.01

Tabel diatas merupakan hasil dari wawancara yang telah diberikan kepada masyarakat nelayan sekitar wilayah UPT-PP Muncar yang mana telah dianalisis. Untuk item pertanyaan 1 (satu) yaitu apakah pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan produksi perikanan, mayoritas responden menjawab “YA” sebanyak 21 responden dengan persentase 69.99% dan sebagian kecil menjawab “TIDAK” sebanyak 9 responden dengan persentase 30.01%.

Item pertanyaan 2 (dua) yaitu apakah pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan kualitas produk perikanan, mayoritas atau keseluruhan responden menjawab “YA” sebanyak 30 responden dengan nilai persentase 100% dan tidak ada satupun responden yang menjawab dengan jawaban “TIDAK”.

Item pertanyaan 3 (tiga) yaitu apakah pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan meningkatkan pendapatan, mayoritas responden menjawab “YA” sebanyak 25 dengan nilai persentase 83.33% dan sebagian kecil responden menjawab dengan jawaban “TIDAK” yaitu sebanyak 5 responden dengan persentase 16.67%.

Item pertanyaan 4 (empat) yaitu apakah pengadaan alat – alat perikanan (alat tangkap, jaring, mesin, dll) dari program pengembangan kawasan

minapolitan meningkatkan hasil tangkap, mayoritas responden menjawab “YA” sebanyak 18 dengan persentase sebesar 59.99% dan sebagian lainnya menjawab “TIDAK” sebanyak 12 responden dengan persentase 40.01%.

Program pengembangan kawasan minapolitan sudah berjalan selama 5 (lima) tahun di tahun 2015 ini terhitung dimulainya program ini pada tahun 2010 lalu. Segala bentuk kegiatan telah dilaksanakan dan segala macam perubahan telah dilakukan demi mewujudkan tujuan dari kegiatan minapolitan yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut. Melihat hasil dari wawancara tingkat perubahan yang dirasakan masyarakat pesisir di Muncar terhadap program minapolitan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan sarana dan prasarana bagi sebagian besar responden telah meningkatkan produksi perikanan dan meningkatkan pendapatan tetapi sebagian kecil responden merasa kegiatan tersebut belum meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan setelahnya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar menunjang peningkatan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat.

Berbeda dengan kualitas produk perikanan, berdasarkan hasil wawancara didapatkan dan dapat disimpulkan bahwa seluruh responden merasa bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang ada telah meningkatkan kualitas produk perikanan sehingga diharapkan selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas produk perikanan tetap dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

Untuk pengadaan alat – alat perikanan (alat tangkap, jaring, mesin, dll) dari program pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan data yang telah didapat sebagian responden merasa bahwa program tersebut telah meningkatkan hasil tangkap, tetapi sebagian kecil responden merasa kegiatan tersebut belum meningkatkan hasil tangkap dengan selisih persentase yang

paling kecil jika dibanding dengan item pertanyaan lain sehingga diharapkan setelahnya pengadaan alat-alat perikanan dari program ini lebih ditingkatkan tetapi tetap mempertimbangkan dan memperhatikan juga kelestarian sumberdaya.

4.5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan data yang telah didapat melalui penelitian baik wawancara, penyebaran angket, observasi, maupun studi pustaka maka dapat diketahui faktor pendukung dan penghambat dari program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di UPT-PP Muncar yang dapat dilihat seperti berikut ini :

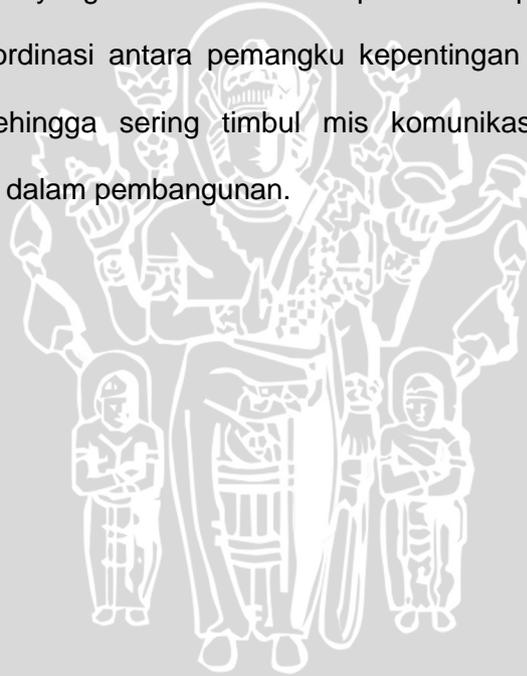
a. Faktor Pendukung

1. Lokasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar terletak di daerah yang cukup strategis serta kondisi jalan yang beraspal dan lokasi yang cukup mudah ditemukan membuat akses ke Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT-PP) Muncar menjadi lebih mudah.
2. Pelabuhan Muncar memiliki kegiatan operasional yang tinggi.
3. Permintaan akan ikan segar maupun olahan yang sangat tinggi. Sehingga ikan dalam jumlah besarpun akan tetap diserap pasar.
4. Kondisi pelabuhan yang sangat luas dengan fasilitas yang dimiliki cukup memadai dan masih dapat dikembangkan

b. Faktor Penghambat

1. Sumberdaya perikanan di Laut Jawa mengalami penurunan karena adanya kegiatan over fishing. Sehingga produksi penangkapan mengalami penurunan.
2. Di tingkat pemerintah :

- Koordinasi ditiap instansi sulit
3. Di tingkat masyarakat :
- Banyaknya masyarakat nelayan dan masih rendahnya kualitas SDM sebagian nelayan
 - Kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep minapolitan.
 - Kurangnya kerjasama masyarakat
 - Nelayan masih sering mengabaikan tata tertib seperti pengurusan SIB maupun surst-surat kapal yang lainnya dan kurangnya menjaga kebersihan lingkungan.
4. Banyaknya kapal yang melabuh dan tidak pernah beroperasi
5. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat sehingga sering timbul mis komunikasi dan kurangnya pemahaman dalam pembangunan.



5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang tingkat keberhasilan implementasi program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap ditinjau dari tingkat kesesuaian program di UPT-PP Muncar, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Tingkat keberhasilan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan ditinjau dari tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelaksana dan peserta atau penerima kegiatan variabel 5 dan 16 berada pada kondisi prioritas utama dimana nilai kepentingan tinggi tetapi kinerja kurang memuaskan. Variabel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 berada pada kondisi untuk mempertahankan prestasi dimana nilai kepentingan yang tinggi diimbangi dengan kinerja yang tinggi pula. Variabel 7 dan 17 berada pada kondisi prioritas yang rendah dimana kepentingan yang rendah memiliki tingkat kinerja yang rendah pula sehingga tidak menjadi prioritas. Variabel 2 berada pada kondisi yang berlebihan dimana memiliki tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kinerja yang tinggi. Sedangkan berdasarkan tingkat kesesuaian program, seluruh program atau kegiatan kecuali penyuluhan bidang perikanan memiliki presentase diatas 50% sehingga bisa dikatakan memiliki tingkat kesesuaian pada tingkat "puas" sedangkan penyuluhan bidang perikanan memiliki persentase dibawah 50% sehingga dikatakan "tidak puas".
2. Tingkat perubahan yang dirasakan oleh masyarakat cukup baik terhadap pengadaan sarana dan prasarana dari program pengembangan kawasan minapolitan baik dalam meningkatkan produksi perikanan, kualitas produk

perikanan, maupun pendapatan dan pengadaan alat-alat perikanan dalam meningkatkan hasil tangkapan dengan tingkat persentase lebih dari 50%.

3. Faktor pendukung dari program pengembangan kawasan minapolitan adalah lokasi UPT-PP Muncar yang cukup strategis, pelabuhan Muncar memiliki kegiatan operasional yang tinggi, permintaan akan ikan segar maupun olahan yang sangat tinggi, kondisi pelabuhan yang sangat luas dengan fasilitas yang dimiliki cukup memadai dan masih dapat dikembangkan dengan faktor penghambat programnya yaitu penurunan sumberdaya perikanan di Laut Jawa, koordinasi di tiap instansi sulit, kualitas SDM nelayan masih rendah, kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep minapolitan, kurangnya kerjasama masyarakat, nelayan masih sering mengabaikan tata tertib, banyaknya kapal yang melabuh dan tidak pernah beroperasi, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran berikut ini diharapkan menjadi salah satu alternatif atau cara untuk menunjang keberlanjutan dari program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di UPT-PP Muncar, saran tersebut yaitu :

1. Perlu mengoptimalkan sosialisasi sebagai salah satu cara pendekatan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program.
2. Perlu adanya optimalisasi dari pelaksanaan kegiatan serta monitoring kegiatan agar hasilnya dapat optimal.
3. Perlu dilakukan evaluasi lebih dalam lagi sehingga kedepannya dapat membuat suatu kebijakan yang sesuai dan lebih baik lagi.